

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Artinya daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atas sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yang cukup. Pemerintah daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi penerimaan daerah sehingga pelaksanaan atas rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (*money follow function*).

Maksud dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simeulue ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponen APBK dan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap realisasi kinerja keuangan Kabupaten Simeulue 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis pendanaan Kabupaten Simeulue dilakukan terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan terhadap jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan susunan/struktur APBK Simeulue, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neraca daerah, yakni aset, hutang daerah, dan ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan sumber penerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Dalam konsep penganggaran yang membolehkan terjadinya defisit pada batas-batas tertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan partisipatif.

3.1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue

3.1.1 Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan kebijakan di bidang keuangan negara.

Perkembangan APBK dan rata-rata realisasi APBK Simeulue tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012

KODE	URAIAN	TAHUN						RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	PENDAPATAN	270.950.956.139	317.675.245.190	314.099.068.645	307.496.948.198	407.387.549.508	420.240.614.402	9,93
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.625.105.935	8.120.735.836	10.586.952.000	8.107.924.049	7.231.084.032	14.790.455.421	44,94
1.1.1.	Pajak daerah	17.240.000	835.233.894	476.838.495	779.699.784	1.455.425.649	2.810.716.251	989,03
1.1.2.	Retribusi daerah	541.919.260	490.611.130	1.132.314.280	1.911.174.174	1.241.968.347	6.800.509.438	120,53
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.396.044.785	4.522.384.844	4.917.542.614	2.246.709.829	1.662.621.609	1.894.682.925	6,23
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	669.901.890	2.272.505.968	4.060.256.611	3.170.340.262	1.230.811.313	2.161.675.043	62,09
1.1.5.	Zakat					1.640.257.114	1.122.871.764	(31,54)
1.2.	Dana Perimbangan	260.902.916.996	292.492.509.574	284.216.365.391	287.556.446.618	342.889.690.872	381.577.673.585	8,20
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	32.210.916.996	34.328.649.574	28.977.309.391	34.907.342.618	32.731.293.872	29.543.687.585	(0,90)
1.2.2.	Dana alokasi umum	184.733.000.000	205.553.860.000	209.826.056.000	218.813.604.000	260.138.597.000	309.799.056.000	11,12
1.2.3.	Dana alokasi khusus	43.959.000.000	52.610.000.000	45.413.000.000	33.835.500.000	50.019.800.000	42.234.930.000	2,55
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.422.933.208	17.061.999.780	19.295.751.254	11.832.577.531	57.266.774.604	23.872.485.396	93,14
1.3.1.	Hibah		3.150.000.000	0	-	0	0	(100,00)
1.3.2.	Dana darurat	-	0	0	-	0	0	
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	-	10.881.446.578	5.476.601.254	5.319.929.131	7.722.957.284	8.461.025.396	0,55
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	1.495.100.000	3.819.150.000	450.000.000	47.586.550.240	12.315.860.000	2.616,97
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.422.933.208	1.535.453.202	10.000.000.000	6.062.648.400	1.957.267.080	3.095.600.000	85,25

Berdasarkan tabel di atas rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar 9,93%, dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per jenis pendapatan terhadap pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan sebesar 8,20%, lain-lain pendapatan daerah sebesar 93,14%, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,94%

Berdasarkan data tersebut diatas pendapatan daerah Kabupaten Simeulue masih lebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum, Bagi hasil SDA dan non SDA, serta Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya diikuti oleh lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi, serta dana penyesuaian, Sedangkan kontribusi PAD menjadi komponen terkecil dalam struktur Pendapatan daerah yang lebih didominasi oleh Retribusi daerah.

Pencapaian target tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial maupun penyesuaian tarif terhadap pengenaan Pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dimana arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dengan menganut pada Pro Poor, Pro growth, dan pro job.

Di Kabupaten Simeulue rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu 2007-201 sebesar 9,60%, pertumbuhan belanja langsung sebesar 17,11 % dan belanja langsung sebesar 5,35%. Sedangkan untuk Proporsi, belanja tidak langsung lebih dominan bila dibandingkan dengan belanja langsung hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk belanja pegawai. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Simeulue tahun (2007-2012)

KODE	URAIAN	TAHUN						RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
2	BELANJA	258.888.854.595	290.689.870.384	349.408.907.464	307.791.983.201	337.884.737.773	397.482.968.006	9,60
2.1	Belanja Tidak Langsung	95.333.757.851	128.888.796.800	158.192.382.633	173.465.424.747	188.718.829.486	206.031.895.630	17,11
1	Belanja Pegawai	74.538.574.401	103.482.175.185	125.280.870.633	144.303.203.341	160.276.584.263	184.797.897.378	20,29
2	Belanja Bunga	-	43.793.950		1.020.499.124	1.083.570.742	120.000	(64,60)
3	Belanja Subsidi	745.200.000	366.670.800	0	-	0		(75,40)
4	Belanja Hibah	2.986.000.000	2.137.000.000	20.095.301.000	14.249.630.000	10.881.646.657	13.835.272.053	157,27
5	Belanja Bantuan Sosial	14.376.246.700	22.751.456.865	4.838.500.500	5.939.747.132	2.289.543.452	3.326.450.000	(9,16)
6	Belanja Bagi Hasil	-	0	0	-	0		
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.592.000.000	0	6.900.000.000	7.472.975.000	13.905.124.972	3.857.337.119	(19,47)
8	Belanja Tidak Terduga	95.736.750	107.700.000	1.077.710.500	479.370.150	282.359.400	214.819.080	158,52
2.2	Belanja Langsung	163.555.096.744	161.801.073.584	191.216.524.831	134.326.558.454	149.165.908.288	191.451.072.376	5,35
1	Belanja Pegawai	19.382.519.810	19.382.519.810	25.012.744.975	20.792.817.200	18.131.963.575	52.778.607.462	38,09
2	Belanja Barang dan Jasa	38.918.564.115	61.915.881.283	88.729.722.204	64.827.673.265	49.877.770.690	79.006.368.776	22,16
3	Belanja Modal	105.254.012.819	80.502.672.491	77.474.057.652	48.706.067.989	81.156.174.023	59.666.096.138	(4,85)

Pada lima tahun ke depan, proporsi alokasi ini akan dicermati dengan lebih baik sejalan dengan dinamika perekonomian dan kondisi sosial di Kabupaten Simeulue. Kebijakan pengalokasian anggaran setiap tahun akan disepakati oleh Bupati Simeulue dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK) dalam Kebijakan Umum APBK (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue (APBK), sesuai dengan substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan pendekatan perencanaan lainnya (seperti *top-down* dan teknokratik).

Tabel 3.3. menyajikan informasi tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Simeulue selama tahun 2007-2011. Penyajian informasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana porsi anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib, mengikat, serta menjadi prioritas dalam anggaran Kabupaten Simeulue.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Simeulue bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalah pengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undangan maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 3.3
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Simeulue

No	Uraian	2007 (RP)	2008 (RP)	2009 (RP)	2010 (RP)	2011 (RP)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	41.565.576.386	52.266.702.449	49.745.864.612	58.827.599.696	67.484.492.505	13,47
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	29.502.037.686	32.737.107.134	38.505.320.778	48.560.521.718	60.344.699.957	19,74
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	506.000.000	560.835.000	593.000.000	271.000.000	242.300.000	-12,08
3	Belanja Bunga	-	43.793.950	(49.556.166)	1.020.499.124	237.744.908	-816,38
4	Belanja bantuan Sosial	9.703.988.700	18.893.466.365	3.532.100.000	2.398.211.854	1.584.317.640	-13,16
5	Belanja bantuan keuangan	1.823.550.000	-	6.900.000.000	6.370.625.000	5.027.000.000	-42,92
6	Belanja Tak terduga	30.000.000	31.500.000	265.000.000	206.742.000	48.430.000	161,93
B	Belanja Langsung	10.067.722.821	9.364.990.815	10.142.732.622	6.712.689.766	7.630.538.800	-4,70
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7.876.277.500	7.444.508.000	8.124.782.000	4.551.237.500	5.794.439.850	-3,25
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1.600.649.571	1.375.674.131	1.577.962.485	1.701.167.266	1.716.063.950	2,33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311.320.750	494.833.684	330.788.137	361.290.000	90.850.000	-9,96
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279.475.000	49.975.000	109.200.000	98.995.000	29.185.000	-10,87
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	1.159.519.000	-45,26
1	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan modal investasi	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	1.159.519.000	-45,26
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-		
	TOTAL (A+B+C)	72.413.726.563	78.331.693.264	72.185.713.750	70.839.389.462	76.274.550.305	1,53

Sumber : DPPKKD tahun 2012

3.1.3 Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Secara historis, jumlah seluruh penerimaan, yakni gabungan dari penerimaan dari pendapatan daerah dan penerimaan dalam pembiayaan daerah, selalu meninggalkan sisa dana pada akhir tahun, yang disebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Untuk tahun anggaran 2007 sampai 2012, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung mengalami penurunan, yakni sebesar Rp. 27.912.925.366 pada tahun 2009 menjadi Rp. 24.141.558.987,- pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan utamanya berkaitan dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) dan atau adanya perencanaan anggaran yang kurang akurat. Rincian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.3
Rincian Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012

KODE	URAIAN	REALISASI					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	PEMBIAYAAN DAERAH						
3. 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah (SILPA)	56.350.823.822	44.533.425.871	49.518.800.677	1.415.291.858	(17.379.743.144)	28.383.912.591
	Penerimaan Pinjaman Daerah				13.000.000.000		
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.500.000.000	22.000.000.000	25.793.670.000	18.500.000.000	23.739.156.000	27.000.000.000
	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah					10.739.156.000	
	Pembayaran Pokok Utang					13.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.850.823.822	22.533.425.871	23.725.130.677	(17.084.708.142)	(41.118.899.144)	1.383.912.591
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	27.912.925.366	49.518.800.677	(11.584.708.142)	(17.379.743.144)	28.383.912.591	24.141.558.987

3.1.4 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Neraca Kabupaten Simeulue periode tahun 2007, yaitu jumlah aset lancar sebesar **Rp 536.587.525** sedangkan jumlah aset tetap sebesar **Rp 409.339.818.996**. Selain itu, nilai aset lainnya sebesar **Rp 9.783.473.517,00**. Total Aset Daerah Kabupaten Simeulue yang tercatat pada tahun 2007 adalah sebesar **Rp 591.214.730.529**.

Kewajiban (utang) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek pada tahun 2007 tercatat sebesar **Rp 150.000.000,00** sedangkan kewajiban jangka panjang tercatat sebesar **Rp 0,00**. Untuk lebih jelasnya mengenai aset daerah Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Simeulue TAHUN 2007-2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2008
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	536.587.525	7.044.445.464	4.996.015.433	5.099.398.048	5.014.898.075	1.219
Kas di Kas Daerah	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang						
Piutang Pajak	5.880.000	601.276.499	223.744.822	474.315.659	993.782.406	18.128
Piutang Retribusi	305.051.430	262.534.640	642.394.470	1.136.090.664	604.366.229	(14)
Piutang Dana Bagi Hasil	30.809.814.402	25.557.375.781	18.612.208.282	23.361.875.999	25.170.817.809	(17)
Piutang Dana Alokasi Umum	76.972.088.000	102.776.932.000	87.427.521.000	91.172.335.000	108.391.085.000	84
Piutang Dana Alokasi Khusus	36.033.000.000	36.827.000.000	31.789.100.000	23.684.850.000	50.019.800.000	2
Piutang Lainnya	6.422.933.208	9.316.020.978	19.295.751.254	8.977.653.331	45.806.360.021	46
Persediaan	225.656.095	1.658.249.481	2.929.876.341	1.239.279.894	791.032.244	886
	160.774.428.195	177.001.889.378	180.828.585.949	160.046.408.647	281.779.288.709	17
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	1.159.519.000	(20)
Penyertaan Modal Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
ASET TETAP						
Tanah	49.731.219.974	51.174.002.966	62.077.343.100	66.547.746.546	74.717.386.403	3
Peralatan dan Mesin	75.837.687.605	66.308.896.678	144.280.950.508	158.698.455.759	171.312.327.779	(10)
Gedung dan Bangunan	134.981.825.586	125.245.879.514	296.822.478.394	309.441.994.448	311.739.256.067	(7)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143.717.317.000	70.586.880.442	140.727.261.301	150.419.589.493	227.141.002.371	(61)
Aset Tetap Lainnya	5.071.768.830	4.190.512.400	5.285.430.961	9.130.851.962	11.059.006.961	(17)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6.732.342.370	466.000.000	5.682.593.274	8.901.716.414	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
Kembalian dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	9.783.473.517	1.940.000.000	-	-	2.659.326.244	(80)
JUMLAH ASET						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	13.000.000.000	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	150.000.000	-	-	-	1.995.000	(100)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)	28.377.800.404	49.518.800.677	(11.584.708.142)	(17.379.743.144)	20.176.248.351	74
Cadangan Piutang	-	24.001.000	-	-	1.740.000	
Cadangan Persewaan	-	1.982.074.997	1.076.191.245	2.060.366.292	1.443.700.016	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -						
Utang Jangka Pendek	(150.000.000)	-	-	(13.000.000.000)	(1.995.000)	(100)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI						
Dilvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	137.065.000.000	182.506.821.570	206.360.491.570	226.860.491.570	193.505.479.892	88
Dilvestasikan dalam Aset Tetap	409.339.618.996	326.240.514.370	649.659.464.209	699.921.233.481	804.870.695.995	(20)
Dilvestasikan dalam Aset Lainnya	9.783.473.517	1.940.000.000	-	-	2.659.326.244	(80)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -						
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN						
Dilvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	684.416.092.917	682.272.212.863	847.511.438.883	896.482.348.189	1.022.855.196.488	(4)

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Simeulue

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Aktiva Lancar	28.377.800.404	49.518.800.677	(11.584.708.142)	(17.039.068.144)	28.383.912.591
	Kewajiban jangka pendek	150.000.000			13.000.000.000	1.995.000
	Rasio Lancar (current ratio)	189			(1)	14,228
2	Aktiva Lancar	28.377.800.404	49.518.800.677	(11.584.708.142)	(17.039.068.144)	28.383.912.591
	Persediaan	-	1.982.074.997	1.076.191.245	2.060.366.292	1.443.700.016
	Kewajiban jangka pendek	150.000.000	-	-	13.000.000.000	1.995.000
	Rasio Quick (quick ratio)	189			(1)	13,504
3	Total Hutang	150.000.000	-	-	13.000.000.000	1.995.000
	Total Aset	584.566.092.917	562.272.212.683	847.511.438.883	911.803.023.199	1.030.864.854.738
	Rasio Hutang terhadap total aset	0	-	-	0	0
4	Total Hutang	150.000.000	-	-	13.000.000.000	1.995.000
	Total Ekuitas	584.416.092.917	562.272.212.683	847.511.438.883	898.462.348.199	1.022.655.195.498
	Rasio Hutang terhadap ekuitas	0	-	-	0	0

3.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2007-2012), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2012-2017. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Simeulue mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya sbb :

Tabel 3.7

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 (masukan dana Otsus di Pendapatan)

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
I	PENDAPATAN	484.195.254.035	524.535.671.395	569.679.129.069	571.828.966.702	621.513.239.640
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	17.478.691.000	18.289.640.840	18.440.627.962	18.440.627.962	18.600.802.875
1.1.1.	Pajak daerah	2.145.000.000	2.810.716.251	2.810.716.251	2.810.716.251	2.810.716.251
1.1.2.	Retribusi daerah	9.195.500.000	9.195.500.000	9.195.500.000	9.195.500.000	9.195.500.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.280.000.000	2.421.949.546	2.572.736.668	2.572.736.668,14	2.732.911.581,31
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	2.158.191.000	2.161.675.043	2.161.675.043	2.161.675.043	2.161.675.043
1.1.5.	Zakat	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	442.797.628.066	482.580.184.980	527.225.891.492	529.375.729.125	578.852.605.270
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/dagi hasil bukan pajak	29.543.687.585	29.276.490.440	29.569.255.345	29.864.947.898	30.163.597.377
1.2.2.	Dana alokasi umum	344.253.937.481	382.540.783.052	425.085.771.768	425.085.771.768,00	472.362.480.982,62
1.2.3.	Dana alokasi khusus	69.000.000.000	70.762.911.488	72.570.864.380	74.425.009.459	76.326.526.911
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.918.937.969	23.965.645.575	24.012.609.614	24.012.609.614	24.059.831.495
1.3.1.	Hibah	0				
1.3.2.	Dana darurat	0				
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	8.307.477.969	8.554.185.575	8.601.149.614	8.601.149.614,35	8.648.371.494,62
1.3.4.	Dana penyelesaian dan otonomi khusus****)	12.315.860.000	12.315.860.000	12.315.860.000	12.315.860.000	12.315.860.000
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.095.600.000	3.095.600.000	3.095.600.000	3.095.600.000	3.095.600.000